

KEBIJAKAN NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBEGALAN DI KOTA KENDARI

La Ode Muhammad Ichsan,* Supriyadi**

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembegalan di Kota Kendari, pelaksanaan kebijakan non penal dalam mencegah terjadinya tindak pidana pembegalan di Kota Kendari, dan merumuskan kebijakan non penal dalam mencegah terjadinya tindak pidana pembegalan di Kota Kendari kedepannya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap responden dan narasumber dan data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data yang digunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif yang bersifat deksriptif dan preskriptif.

Penelitian ini mempunyai tiga kesimpulan. Pertama, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembegalan di Kota Kendari yaitu rendahnya kesejahteraan masyarakat, lingkungan yang tidak terkontrol, peredaran dan pengaruh minuman beralkohol tradisional, pola pengasuhan keluarga yang buruk, perilaku dan sikap korban, sifat dan karakter masyarakat yang apatis, kurangnya efek jera dari sanksi pidana yang diberikan, dan pembinaan di lembaga Pemasyarakatan yang tidak efektif. Kedua, pelaksanaan kebijakan non penal untuk mencegah terjadinya tindak pidana pembegalan dilakukan melalui instansi kepolisian, pemerintah, dan masyarakat dengan melakukan himbauan, sosialisasi dan patroli. Penerangan jalan umum dan lingkungan, membuka lapangan pekerjaan, dan pengembangan masyarakat. Melaporkan setiap terjadinya tindak pidana pembegalan, penyuluhan, kampanye maraknya tindak pidana pembegalan, dan membuat kegiatan keolahragaan. Ketiga, kebijakan non penal untuk mencegah terjadinya tindak pidana pembegalan kedepannya dengan kepolisian membentuk tim reaksi cepat yang bekerja sama dengan TNI, kepolisian membuat aplikasi sistem informasi berbasis android, pembinaan mental dan moral anak, orang tua membatasi anak dalam menggunakan sepeda motor pada saat malam hari, pemerintah harus menerapkan program wajib pendidikan 9 tahun, pemerintah membentuk komunitas Pengawasan lingkungan di setiap kelurahan, operasi yustisi kepolisian dengan elemen lainnya lebih efektif, dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan harus sesuai keahlian.

Kata Kunci : Kebijakan Non Penal, Penanggulangan, Tindak Pidana Pembegalan

* Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

** Dosen Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

THE NON-PENAL POLICY OF MOTORCYCLE ROBBERY PREVENTION IN KENDARI

La Ode Muhammad Ichsan,* Supriyadi**

ABSTRACT

The current research aims to recognise and to analyse the factors affecting the occurrence of motorcycle robbery in Kendari, the operation of non-penal policy in preventing the occurrence of motorcycle robbery in Kendari, and the formulating of non-penal policy in preventing the occurrence of motorcycle robbery in Kendari.

The type of this research is an empirical normative research using primary and secondary data. The primary data obtained from interview of respondents and interviewees, the secondary data consist of primary, secondary, tertiary legal materials. The data analysis uses constitution and conceptual approach. The result of study is investigated qualitatively which is descriptive and prescriptive.

There are three conclusions drawn from the research. Firstly, factors affecting the motorcycle robbery in Kendari is the lack of social welfare, uncontrolled environment, circulation and influence of alcoholic beverages, poor of family parenting, victim's behaviour and attitudes, the apathetic character of the environment, the deterrent effect of the given sanction, and ineffective guidance in correctional institution. Secondly, the implementation policies of non-penal to prevent criminal act of motorcycle robbery carried through police, government agency, and the community who appeal, socialization, and patrol. Public and environmental street lighting, creating job, and community development. Reporting the act of motorcycle robbery, counselling, campaigning for criminal act of motorcycle robbery, and creating sport activities. Thirdly, non-penal policies to prevent future act of motorcycle robbery with the police in forming a rapid reaction team which collaborates with TNI, the police create an information system with android-based application, mental and moral guidance for children, parents limiting their children from motor biking at night, the government must implement the compulsory 9 years of education program, the government establish an environmental monitoring community in every sub district, the police justice operation with other elements, and the guidance in correction institution must be according to expertise.

Key words: Policy, Prevention, Motorcycle Robbery.

* Student of Master of Law Science at Gadjah Mada University.

** Lecturer In Magister Of Law, Gadjah Mada University.